## BAB VI PENUTUP

## 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang analisis penatausahaan keuangan desa pada Desa Umanen Lawalu Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 dan 2017, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan:

- Dalam aspek perencanaan keuangan desa, Pemerintah Desa Umanen Lawalu selalu melibatkan masyarakat dalam musyawarah tingkat dusun maupun musyawarah tingkat desa sehingga program-program yang akan direncanakan untuk dilaksanakan sesusai dengan kebutuhan masyarakat.
- Di Desa Umanen Lawalu seluruh penerimaan dan pengeluaran dana telah dilaksanakan melalui rekening kas desa. Dalam pelaksanaannya pun Bendahara Desa menyimpan dana dengan jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 3. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa Umanen Lawalu tidak melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penggunaan keuangan desa sebelum pembayaran suatu kegiatan dilakukan oleh Bendahara Desa. Hal ini menyebabkan tidak berjalannya fungsi kontrol atau pengawasan atas pengeluaran keuangan desa. Dengan demikian, pengendalian internal atas penggunaan keuangan desa dapat dikatakan tidak menjamin keamanan aset desa, khususnya kas.
- 4. Untuk proses penatausahaan keuangan desa, Bendahara Desa Umanen

  Lawalu telah melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi

penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Namun penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa selalu terlambat. Hal ini terbukti dari adanya penyampaian laporan pertanggungjawaban yang selalu disampaikan setelah tanggal 10 setiap bulannya.

5. Faktor-faktor penyebab penatausahan keuangan desa di Desa Umanen Lawalu Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka tidak berjalan baik adalah sumber daya manusia yang kurang kompeten, dan penggunaan teknologi informasi yang kurang dipahami oleh aparat pengelola keuangan desa. Secara umum faktor-faktor itulah yang menyebabkan penatausahaan keuangan desa di Desa Umanen Lawalu tidak berjalan baik.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran penulis kepada Pemerintah Desa Umanen Lawalu adalah sebagai berikut:

- Agar fungsi pendalian internal atas penggunaan keuangan desa dapat memenuhi tujuan pengendalian internal yang baik, khususnya sehubungan dengan pengendalian internal untuk kas, maka setiap bukti pengeluaran kas harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa sebelum diotorisasi oleh Kepala Desa.
- 2. Perlu adanya pelatihan dan pendampingan teknis yang cukup dan berkelanjutan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga sumber daya manusia di Desa Umanen Lawalu dengan latar belakang pendidikan dan keahlian teknis yang kurang dapat ditingkatkan

kemampuannya. Hal ini perlu dilakukan sehingga penatausahaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik, dan laporan pertanggungjawabannya selalu dapat dilakukan tepat pada waktunya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad, S. Ruky. 2003. *Kualitas Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: ReD Post Press.
- Bintarto, R. 1989. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Cordoso, F. Gomes. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta.: Andi
- Halim, Abdul. 2011. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanif, Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta Penerbit Erlangga.
- Hariandja, Marihot Tua Efendi. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai. Jakarta: Grasindo.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Indriantoro, Nur. 2000. Pengaruh Computer Anxiety terhadap Keahlian Dosen dalam Penggunaan Komputer. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia. Vol.4 No.2. Desember.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Kebijakan Umum Dana Desa*. (Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014).
- Kharis, Abdul. 2010. Pengaruh Kualitas Sumber Daya manusia Terhadap Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada PT. Avia Avian. Skripsi. UPN Veteran, Jawa Timur.
- KPK. 2015. Laporaran Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa; Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

- Mamelo, Gresly Yunius Rainal. 2015. Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
- Martindas, Rudolf Wennemar. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia Lewat Konsep Ambisi, Kenyataan dan Usaha. Jakarta: Edisi II, Grafiti
- Munandar, Yuliansyah. 2017. Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Wilayah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.
- Nawawi, Hadari. 2006. Evaluasi dan manajemen kinerja di lingkungan perusahaan dan industri. Yogyakarta: Gadjah Mada Univercity Press.
- O'Brien, James. 2005. Pengantar Sistem Informasi Perspektif Bisnis dan Manajerial. Jakarta: Salemba Empat.
- Parasara, Anak Agung Putra., dan Abdul Halim. 2017. *Analisis Penatausahaan Dana Desa Studi pada Desa Ngalanggeran dan Desa Wareng Kabupaten Gunungkidul.* Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah. Vol. 7 No.1: 1-13.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentan Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang *Dana Desa Yang Bersumber*Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*
- Ristiansari, Maulita Sofie. 2016. Implementasi Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.
- Rivai, Veithzal. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktek. Raja Grafindo Persada

Setyoko, Paulus Irawan. 2011. Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Jenderal Sudirman

Stoner, James A.F. 2006. *Manajemen*. Jilid I. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat

Supardi, M.d. 2006. Metodologi Penelitian. Mataram: Yayasan Cerdas Press

Sutarman. 2012. Buku Pengantar Teknologi Informasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Wida, Siti Ainul. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi

Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa. Jakarta: Rajawali Pers.

Yatminiwati, Mimin. 2017. Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Studi pada Kantor Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang